



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 87 /PMK.05/2009 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2009

KEMENTERIAN/LEMBAGA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : DD-MM-YYYY Nomor :

Kuasa Bendahara Umum Negara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara	999
agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. (dengan angka)	
*** (DENGAN HURUF) ***	
Cara Bayar : ☒ (diisi uraian cara bayar)	Tahun Anggaran : 2009
Dasar Pembayaran	Klasifikasi Belanja 5513 KP/KD/DK/TP/DS KP
UU No.41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 (01)	
DIPA Nomor	Fungsi, Sub Fungsi, Program xx.xx.xx
TANGGAL	Satker Unit Organisasi Lokasi
	XXXXXX 999.06 01.51
	DIISI NAMA SATKER
	Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran : 2 Pengesahan
	Sumber Dana dan Cara Penarikan : 01.0 RM /RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Keg/Sub.Keg MA	Jumlah Uang	Lemb Unit Lok MA	Jumlah Uang
XXXX.XXXX.551323	999.999.999,-	015.05.001.412116	999.999.999,-
Jumlah Pengeluaran	999.999.999,-	Jumlah Potongan	999.999.999,-
Rp.			NIHIL

Kepada : (diisi perusahaan penerima BM-DTP & alamat)
NPWP :
Nomor Rek :
Nama Rek :
Bank/Pos :
Uraian : Pembayaran Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk industri

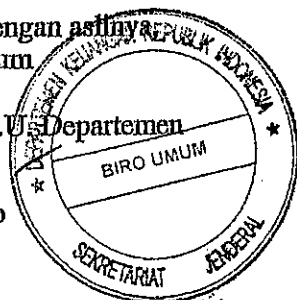
JAKARTA, tanggal seperti di atas
A.n. Menteri Keuangan
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.Us Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 87 /PMK.05/2009 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2009

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi tiga pihak antara:

1. KPA atas pendapatan BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pendapatan beserta dokumen sumber berupa SSPCP yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SAI.
2. KPA atas belanja subsidi BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal..... yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi belanja beserta dokumen sumber berupa SPM/SP2D yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SA-BSBL.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan data penerimaan perpajakan, SPM, dan SP2D yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode pelaporan triwulan.....tahun anggaran.....dengan melakukan proses pencocokan data dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. DIPA

Jumlah Estimasi Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah Alokasi Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

2. LRA

Jumlah LRA Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah LRA Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DJBC Selaku KPA Pendapatan BM-DTP	DJPB c.q Dit.PKN Selaku Kuasa BUN-Pusat	Ditjen Selaku KPA Belanja Subsidi BM-DTP
PENDAPATAN			
BELANJA SUBSIDI			

yang secara rinci tertuang dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Perbedaan data yang tertuang dalam BAR dan Lampiran BAR, menjadi dasar dilakukannya perbaikan atau dipergunakan sebagai dasar untuk penjelasan atas data dan laporan keuangan masing-masing pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, (tgl), (bln), (tahun)

DJBC	DJPB	Direktorat Jenderal
Nama : NIP.	Nama : NIP.	Nama : NIP.

MENTERI KEUANGAN

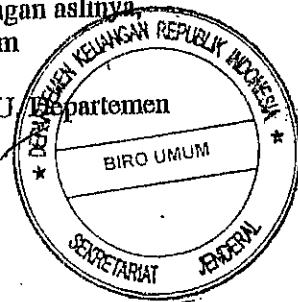
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. / Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX-XXXXXXXXXX-XXXX
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN /LEMBAGA : (015) KEUANGAN
ESELON I : (05) DITJEN B&C
WILAYAH/PROPINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : XXXXX KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JENIS SATUAN KERJA : (KP) KANTOR PUSAT

KODE LAP : XXXXXX
TANGGAL : XX/XX/XXXX
HAL : XX
PROG ID :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REAL. PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
I XX XXX XXXX XXXXX XXXXXXX	Pendapatan Dalam Negeri					
	Pendapatan Negara Bukan Pajak					
	PNBP Lainnya					
	Pendapatan Penjualan, Sewa, dan Jasa	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	Uraian Mata Anggaran					
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	Jumlah Pendapatan XXXX					
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99
	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99999,99



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

II	Pendapatan Hibah				
XX	Pendapatan Hibah				
XXX	Pendapatan Hibah				
XXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri				
XXXXX	Pendapatan Hibah Dalam Negeri				
XXXXXXX	Uraian Mata Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	Jumlah Pendapatan XXXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	Jumlah Pendapatan XXXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	Jumlah Pendapatan XXX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	Jumlah Pendapatan XX	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	Jumlah Pendapatan Hibah	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
III	Transaksi Non Kas				
XXXX	Pendapatan Hibah				
XXXXX	Pendapatan Hibah				
XXXXXX	Uraian Mata Anggaran	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	Jumlah Transaksi Non Kas	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99
	JUMLAH PENDAPATAN, HIBAH, DAN TRANSAKSI NON KAS	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999999.99



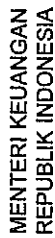
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN LEMBAGA	: (999)	BEND. UMUM NEGARA	KODE LAP.	XXXXXX
ESELON I	: (06)	BSBL	TANGGAL	: XXXXXXXX
WILAYAH/PROPINSI	: (0100)	DKI JAKARTA	HALAMAN	: XX
SATUAN KERJA	: XXXXXX	KANTOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PROG. ID	: XXXXXXXX
JENIS SATUAN KERJA	: (KP)	KANTOR PUSAT		

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REAL ANGG.	SISA ANGGARAN
				JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
XX	Uraian Sumber Dana							
X	Uraian Cara penarikan							
XX	Uraian Fungsi							
XX	Uraian Sub Fungsi							
XXXX	Uraian Program							
XXXX	Uraian Kegiatan							
XXXX	Uraian Sub Kegiatan							
XX	Uraian Jenis Belanja							
XXXX	Uraian Jenis Belanja							
XXXXXX	Uraian MAK	999.999.999,999	999.999.999,999	999.999.999,999	999.999.999,999	999.999.999,999	99.999,99	999.999.999,999





**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

150

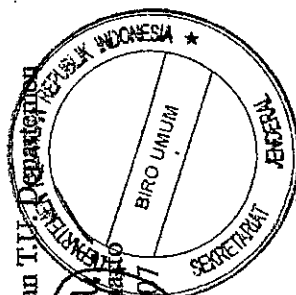
XXXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
XXXXXXX	Uraian MAK	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA XXXX Jumlah Transaksi Non Kas	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999
	JUMLAH BELANJA + TRANSAKSI NON KAS	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	999,999,999,999	99,999,99	999,999,999,999

**Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum**

u.b.

Kepala Bagian T.I. Departemen

Antoniusz Sulbarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN,

ttol.

SRI MULYANTINDRAWATI